



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PROVINSI JAMBI
DALAM RANGKA PENINJAUAN KAPASITAS PRODUKSI SAWIT UNTUK
MENDUKUNG KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PRODUKSI MINYAK GORENG
DAN TURUNANNYA**



**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021 - 2022
27 - 29 JANUARI 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke daerah guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 – 2022, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Perkebunan Nusantara VI, Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2022 terkait dengan peninjauan kapasitas produksi sawit untuk mendukung ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dan turunannya.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara lebih khusus, kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dan kapasitas produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebagai bahan baku utama minyak goreng dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng.
2. Mengetahui kinerja operasional dan keuangan PTPN Group secara umum dan PTPN VI secara khusus.

3. Menggali permasalahan terkait tingginya kenaikan harga minyak goreng di pasar, khususnya dari *persepective* hulu (*supplier/produsen bahan baku*).
4. Mendapatkan strategi untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng dari pihak-pihak terkait khususnya dari *perspective* produsen bahan baku minyak goreng/produsen CPO.

C. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jambi tersebut, dalam kunjungan kerja spesifik kali ini akan melibatkan PT Perkebunan Nusantara VI, sebagai salah satu BUMN yang bergerak di industri minyak kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, kunjungan kerja kali ini juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian BUMN yaitu Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Perwakilan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* sebagai induk perusahaan perusahaan PTPN Group.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	KETUA TIM / F. PDIP
2.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.P.GOLKAR
3.	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc	F.P.GOLKAR
4.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.P.GERINDRA
5.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LLM	F.P.GERINDRA
6.	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F. P.NASDEM
7.	A-19	MARWAN JA'FAR	F.PKB
8.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.P.DEMOKRAT
9.	A-447	AMIN AK, M.M.	F. PKS
10.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F.PKS
11.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan kenaikan harga komoditas minyak goreng. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat bahwa harga minyak goreng curah nasional di 34 provinsi per 20 Januari 2022 masih berada pada kisahan Rp. 19.000 sampai dengan Rp. 28.000 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan mencapai lebih dari Rp. 20.000 per liter.

Beberapa penyebab dari kenaikan harga tersebut adalah lonjakan harga CPO dunia. Kenaikan harga bahan baku minyak goreng tersebut tentu saja berdampak pada kenaikan harga minyak goreng sebagai produk turunannya. Kenaikan harga CPO dunia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* dimana permintaan kembali meningkat signifikan pasca melonggarnya *lockdown* pandemi Covid-19 di beberapa negara. Sementara itu, dari dalam negeri, permintaan Biodiesel untuk program B30 juga dinilai menjadi sumber permasalahan tingginya harga CPO nasional.

Selain permasalahan lonjakan harga seperti yang terurai di atas, di sisi faktor produksi, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh belum terintegrasinya produsen minyak sawit/CPO dengan minyak goreng. Dengan entitas bisnis yang berbeda tersebut, para produsen minyak goreng harus membeli bahan baku berupa CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri yang berkorelasi dengan harga pasar internasional. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional maka harga CPO dalam negeri akan meningkat yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng sebagai produk akhirnya.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, dalam kunjungan kerja spesifik kali ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui secara langsung terkait dengan kapasitas produksi minyak sawit dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng. Selanjutnya, melalui kegiatan ini diharapkan akan dihasilkan rekomendasi strategi dalam rangka mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini terjadi. Selain itu, Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PTPN group secara umum dan PTPN VI secara khusus.

Berdasarkan topik bahasan tersebut di atas, beberapa penjelasan yang disampaikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dan PT Perkebunan Nusantara VI terinci sebagai berikut:

Pemaparan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding*

1. PTPN Group mengelola lahan/areal konsesi seluas 1,17 Juta hektar di seluruh wilayah Indonesia dengan total areal yang telah tertanami (planted area) seluas 854 Ribu hektar. Adapun rincian jenis tanaman yang dikelola oleh PTPN Group beserta luasannya sebagai berikut :

Jenis Tanaman/Komoditas	Luas Statements & Pabrik
Kelapa Sawit	565 Ribu Hektar
Tebu	53 Ribu Hektar
Karet	138 Ribu Hektar
Teh	30 Ribu Hektar
Kopi	13 Ribu Hektar
Kakao	644 Hektar
Tembakau	44 Hektar
Lainnya	54 Ribu Hektar

2. Produk-produk yang dihasilkan oleh PTPN Group antara lain minyak kelapa sawit, minyak palm kernel oil, karet, *ribbed smoke sheets*, gula, *crumb rubber*, bubuk cokelat, tembakau, minyak goreng, bubuk kopi, teh kemasan, bioetanol dll.
3. Jumlah dan kapasitas pabrik yang dikelola oleh PTPN group terinci sebagai berikut :

Jenis Pabrik	Jumlah Unit	Kapasitas
Kelapa Sawit	75	3.205 ton TBS/jam
Pengolahan Karet	65	757 ton KK/jam
Kernel Oil	6	1.395 ton kernel/jam
Pengolahan Teh	36	1.078 ton/hari
Gula	43 (beroperasi 35)	116.000 TCD
Minyak Goreng	1	2.500 ton CPO/hari

4. Khusus untuk komoditas kelapa sawit dan CPO, total realisasi produksi sampai dengan Desember 2021 oleh PTPN group terinci sebagai berikut :
 - a. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebesar 12.469 ribu ton yang terdiri dari 9.822 ribu ton merupakan produksi TBS sendiri dan 2.647 ton merupakan produksi TBS pihak ketiga.
 - b. Produksi CPO total sebesar 2.685 ribu ton yang terdiri dari 2.182 ribu ton merupakan produksi CPO sendiri dan 502 ribu ton merupakan produksi CPO pihak ketiga.
5. Perkembangan kinerja PTPN Group di tahun 2021 terinci pada tabel sebagai berikut:

Indikator	Nilai	Keterangan
Aset	Rp. 145,47 T	Peningkatan sebesar 10,47% YoY dan tercapai 107,18% dari RKAPP 2021
Liabilitas	Rp. 80,43 T	Naik 3,37 YoY dan 98,92% terhadap RKAPP 2021
Ekuitas	Rp. 65,05 T	Naik 20,72 % YoY dan 19,52% diatas target dalam RKAPP 2021
Revenue	Rp. 51,74 T	92,99% terhadap RKAPP 2021 dan 31,36% diatas pencapaian tahun sebelumnya
Net Profit	Rp. 4,03 T	145,95% dibanding RKAPP 2021 dan 454,70% lebih tinggi dari tahun 2020

6. Terkait dengan permasalahan harga minyak goreng nasional, PTPN Group senantiasa berkomitmen mendukung program Pemerintah berupa operasi pasar satu harga Rp.14,000 dengan berpartisipasi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya wilayah kerja PTPN dan lokasi-lokasi strategis lainnya.

Pemaparan PT Perkebunan Nusantara VI

1. PT Perkebunan Nusantara VI secara garis besar mengelola dua komoditas utama yaitu kelapa sawit dan teh dengan rincian sebagai berikut

Komoditas	Luas TM	Kapasitas Produksi
Kelapa Swit	27 Ribu Hektar	909 Ribu Ton Produksi TBS 199 Ribu Ton Produksi CPO
Teh	2,4 Ribu Hektar	6 Ribu Ton

2. Perkembangan kinerja PTPN VI di tahun 2021 terinci pada tabel sebagai berikut:

Indikator	Nilai	Keterangan
Aset	Rp. 5,21 T	Sebesar 119,89% terhadap aset tahun 2020 dan tercapai 110,50% dari RKAPP 2021
Liabilitas	Rp. 3,36 T	112,22% terhadap RKAPP 2021 dan 120,21% terhadap liabilitas tahun 2020
Ekuitas	Rp. 1,85 T	107,50% terhadap RKAPP 2021 dan 119,32% terhadap ekuitas tahun 2020
<i>Revenue</i>	Rp. 2,50 T	97,26% terhadap RKAPP 2021 dan 160,33% terhadap <i>revenue</i> tahun 2020
<i>Net Profit</i>	Rp. 205,26 M	120,22% dibanding RKAPP 2021 dan 278,31% terhadap <i>net profit</i> tahun 2020

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Terkait dengan kinerja perusahaan serta kapasitas produksi kelapa sawit dan CPO sebagai bahan baku minyak goreng oleh PTPN Group pada umumnya dan PTPN VI pada khususnya, beberapa masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja PTPN Group yang telah mampu memenuhi target produksi kelapa sawit dan CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
2. Terkait dengan kenaikan harga kelapa sawit dan potensi yang besar dari industri kelapa sawit, Komisi VI DPR RI mendorong PTPN Group, salah satunya PTPN VI untuk lebih fokus di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta membuat strategi jangka panjang untuk pengembangan industri kelapa sawit tersebut.
3. Komisi VI DPR RI meminta PTPN Group untuk memperhatikan aspek peremajaan perkebunan khususnya untuk komoditas kelapa sawit sehingga sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dapat terjamin keberlanjutannya.
4. Komisi VI mendorong PTPN Group untuk tidak hanya mencari profit, namun juga dapat berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan strategis nasional.
5. Komisi VI meminta PTPN Group untuk terus memantau restrukturisasi kredit perusahaan mengingat jumlah liabilitas perusahaan yang cukup besar serta melakukan pengelolaan liabilitas dengan lebih baik agar tidak membebani perusahaan.
6. Untuk PTPN VI, Komisi VI DPR RI mendorong agar PTPN VI agar mengembangkan perkebunan kopi mengingat utilitas areal perkebunan kopi yang masih kecil di wilayah PTPN VI.
7. Komisi VI DPR RI mendorong PTPN Group untuk menyelesaikan pelaksanaan digitalisasi perusahaan dengan baik dan berkualitas dalam rangka mendorong kinerja perusahaan.
8. Komisi VI DPR RI meminta PTPN Group untuk memperhatikan partisipasi wanita sebagai karyawan dalam ekosistem PTPN Group.

Catatan :

1. Detail kredit PTPN Group meliputi tahun pencairan, skema, tujuan penggunaan dll untuk dapat disampaikan kepada Komisi VI DPR RI secara tertulis untuk dapat didalami oleh Komisi VI DPR RI dan/atau dilakukan pembahasan dalam tahap selanjutnya.
2. *Roadmap* secara garis besar PTPN Group, termasuk didalamnya tanaman/komoditas prioritas secara jangka panjang serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan untuk dapat disampaikan secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI dan/atau dilakukan pembahasan dalam tahap selanjutnya.

3. Terkait dengan sengketa lahan (HGU) di PTPN XIV Sulawesi Selatan dengan warga setempat, Komisi VI DPR RI meminta PTPN Group untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut dan dimungkinkan pada masa sidang selanjutnya untuk dilakukan kunjungan kerja ke PTPN XIV terkait permasalahan sengketa lahan tersebut.
4. PTPN Group diminta menyampaikan hal-hal terkait pembentukan holding PTPN yang telah dilaksanakan termasuk dampaknya bagi kinerja perusahaan sehingga hal tersebut dapat menjadi *benchmarking* bagi pelaksanaan holdingisasi BUMN-BUMN yang lain. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dalam rapat-rapat/pertemuan selanjutnya.

Keterangan :

Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Perkebunan Nusantara VI, Provinsi Jambi pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 02 Februari 2021

Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI

Ke Provinsi Jambi

TTD.

RIEKE DIAH PITALOKA

A-170

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jambi Bersama Direksi
PT Perkebunan Nusantara VI Beserta Jajaran



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI,
Rieke Diah Pitaloka, Memimpin Jalannya Rapat



Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Perkebunan Nusantara VI, Provinsi Jambi



Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Perkebunan Nusantara VI, Provinsi Jambi